

DIAGNOSA PERMASALAHAN SOSIAL DI KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTAMADYA TOMOHON - MINAHASA¹

Rusmiyati, SE²

ABSTRAK

Kotamadya Tomohon sebagai salah satu kota yang baru memisahkan diri dengan Kabupaten Minahasa memiliki berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Masalah dimaksud adalah belum tersedianya data (*database*) yang akurat sebagai bahan untuk menyusun rencana program pembangunan wilayah. Penelitian ini secara deskriptif mencoba menggambarkan kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Kotamadya Tomohon, khususnya di Kecamatan Tomohon Tengah yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Talete Satu, kelurahan Talete Dua, Kelurahan Matani Satu, Kelurahan Matani Dua, Kelurahan Matani Tiga, Kelurahan Komasi, dan Kelurahan Kolongan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial sebagian besar bersumber dari kondisi ekonomi penduduk yang rendah, yang antara lain disebabkan oleh merosotnya pendapatan bidang pertanian. Sementara itu untuk beralih ke luar sektor pertanian belum didukung oleh kondisi SDM yang memadai. Oleh karena itu, masalah kemiskinan dan masalah lain yang terkait cukup dominan di wilayah ini, misalnya fakir miskin, rumah tidak layak huni, lanjut usia terlantar, dan keluarga rentan. Untuk itu penelitian ini mengajukan rekomendasi antara lain: (1) perlunya program pemberdayaan fakir miskin sesuai dengan kondisi setempat; (2) penanganan masalah lanjut usia yang sudah ada pedoman pengembangannya, perlu penanganan yang lebih tuntas; dan (3) perlu membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, serta meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar lebih berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kata kunci:

Masalah Sosial, Kemiskinan

¹ Diangkat dari penelitian “Diagnosa Permasalahan Sosial di Kecamatan Tomohon Tengah Kotamadya Tomohon, Minahasa, dengan Tim: Drs. Ahendy Priatna, M.Si, Drs. Agus Dairo Beke, MM, dan Rusmiyati, SE.

² Rusmiyati, staff Subbid Perencanaan dan Anggaran, Bidang Program, Puslitbang Kessos

Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintahan dalam negeri dengan sistem otonomi daerah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap permasalahan sosial secara lokal. Jika pemerintahan sebelumnya (Zaman Orde Baru) bersifat sangat *power oriented* yang bernuansa pelestarian rezim kekuasaan, tidak memberi ruang gerak pada masyarakat, dan semua harus menunggu perintah penguasa, maka kini semuanya berubah dalam bentuk keterbukaan, dan dengan demikian semua permasalahan yang selama ini terpendam secara terselubung muncul ke permukaan.

Otonomi daerah merupakan jembatan menuju kemajuan suatu daerah, tetapi dibalik itu merupakan sumber masalah baru, yaitu dengan munculnya masalah lain berupa berbagai konflik kepentingan di setiap daerah otonom. Persoalan-persoalan muncul secara estafet dan ragamnyapun semakin banyak, sejalan pula dengan perkembangan suatu daerah (Otonom), bobot permasalahan baik secara kuantitas maupun kualitas cenderung meningkat.

Tiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda sesuai kondisi daerah masing-masing. Jika digeneralisir permasalahan setiap daerah akan terlihat adanya permasalahan yang serupa, hanya motifnya yang berbeda-beda. Sebagai contoh: kenakalan remaja, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya hampir terjadi di semua daerah.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tomohon menjadi semakin besar dan bertambah. Pemerintah Kota Tomohon dituntut untuk melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial serta menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dalam ruang lingkup bidang tersebut dengan sumber daya atau potensi yang terbatas, baik dari sisi SDM, sarana dan prasarana maupun dari sisi anggaran.

Sebagai upaya untuk menggali sumber permasalahan dapat dilakukan melalui suatu pengkajian berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Upaya memaparkan dan mendiagnosa permasalahan di setiap daerah bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang sumber dan motif permasalahan yang dikaji berdasarkan struktur sosial, kondisi ekonomi politik dan budaya masyarakat di masing-masing daerah. Ilustrasi diatas memberi gambaran bagaimana permasalahan masyarakat di berbagai daerah dengan perbedaan kondisi geografis, struktur masyarakat, budaya

dan nilai masyarakat setiap daerah mewarnai jenis dan jumlah permasalahan yang terdapat dimasing-masing daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan pokok penelitian ini adalah bahwa daerah belum memiliki data yang akurat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS). Oleh karena itu, masih mengalami hambatan dalam merumuskan kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang responsif terhadap kondisi yang ada.

Penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang sempurna tentang permasalahan sosial, baik tentang potensi penyebab tumbuh kembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat maupun kuantitas dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah penelitian.

Permasalahan sosial terjadi dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia dengan faktor dan tingkat frekuensi yang berbeda-beda. Munculnya anekaragam permasalahan sosial tersebut bila didiagnosa lebih mengacu pada kasus sebab akibat, artinya masalah itu timbul karena ulah manusia, dan ketika manusia menangani masalahnya disitu timbul masalah lagi sehingga semakin lama semakin membesar ibarat bola salju (*snow ball*) dan berkarakter masalah yang akan menimbulkan masalah yang lain.

Permasalahan sosial bersumber dari faktor internal yakni suatu sistem sosial yang menunjuk gejala ketimpangan struktural di masyarakat dalam penanganan permasalahan, sedangkan faktor eksternal lebih mengacu pada kebijakan pemerintah yang diwarnai dengan intervensi pemerintah melalui program di berbagai sektor. Akibat dari intervensi pemerintah yang sangat dominan, pada akhirnya menimbulkan permasalahan, misalnya: *pertama*, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah menjadi sangat tinggi, sehingga ketika masyarakat sedikit mengalami masalah, harapannya adalah menunggu bantuan pemerintah. *Kedua*, kemandirian menjadi hilang sehingga pola membantu mereka agar menolong dirinya sendiri jadi hilang. Dampaknya menimbulkan masalah baru yang secara proses dimulai dengan ketiadaan kepercayaan diri untuk bangkit berupaya keluar dari masalah, berpasrah menerima keadaan apa adanya.

Individu-individu atau masyarakat yang mengalami masalah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Ada 27 jenis PMKS yang telah diidentifikasi

Departemen Sosial, antara lain: balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, wanita yang menjadi korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan narkoba, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar, penyandang HIV/AIDS, dan keluarga rentan (Pusat Data dan Informasi Depsos, 2002).

Suatu hal yang erat kaitannya dengan PMKS adalah sumber kesejahteraan sosial. Pengertian sumber menurut Max Siporin (Sukoco, 1991), adalah sesuatu yang bermanfaat, dapat dimobilisasi dan dapat digunakan sebagai alat dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah. Setiap masyarakat mempunyai berbagai potensi dan sumber antara lain sumber daya alami, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Untuk mempertahankan kehidupannya, suatu masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya ini dalam berbagai aktivitas seperti aktivitas ekonomi, sosial, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong dan sebagainya. Di dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial merupakan faktor kekuatan/modal, sedangkan masalah kesejahteraan sosial dapat dipahami sebagai faktor kelemahan atau tantangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat tidak hanya mempunyai kelemahan atau tantangan, tetapi juga potensi dan sumber yang merupakan kekuatan diri untuk menghadapi kelemahan atau tantangan. Namun demikian tidak semua golongan atau masyarakat mampu memanfaatkan sumber dengan baik. Dalam hal yang demikian diperlukan pihak luar untuk menyadarkan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber yang ada secara maksimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan maksud mencari dan menggali persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat dengan menggali kenyataan sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Teknik pengumpulan data

menggunakan: data sekunder, wawancara mendalam: dengan masyarakat umum, penyandang masalah, tokoh masyarakat (formal atau informal) dan juga aparat setempat, dan observasi terhadap kondisi fisik lokasi, tata kehidupan masyarakat setempat (masyarakat lokasi penelitian), pola hidup (kegiatan ekonomi) potensi geografis wilayah dan sumber daya manusianya serta faktor-faktor lain yang berkaitan.

Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Wilayah

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data Bapeda Kota Tomohon (Maret 2005) berjumlah: 6938 KK atau mencapai 16,02%. Hal ini memberi indikasi bahwa dari tahun ke tahun terjadi peningkatan penduduk miskin yang nantinya berdampak pada masalah sosial dan kesehatan. Meningkatnya kasus-kasus penyakit pada akhir-akhir ini seperti demam berdarah dengue (DBD) 14 kasus, malaria: 217 kasus, TB paru klinis: 763 kasus, Hipertensi: 3860 kasus, diabetes militus: 362 kasus. Hal ini diakibatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehat belum optimal, serta gaya hidup cenderung berpesta-pesta dengan ungkapan "*Kalau ada tada kalau tidak haga* " akhirnya berdampak pada kesehatan dan masalah sosial.

Meningkatnya pengangguran dan permasalahan sosial lainnya dikarenakan minimnya pendidikan formal dan keterampilan anak-anak putus sekolah, dimana data menunjukkan anak terlantar sebanyak 6900 orang, anak nakal: 1236 anak. Anggapan masyarakat bahwa permasalahan sosial adalah tanggung jawab pemerintah. Penyandang masalah kesejahteraan sosial pada umumnya mengalami masalah kemiskinan dan kondisi ketidakberdayaan fakir miskin dapat dilihat dari tidak adanya alternatif individu, keluarga dan komunitas dalam menentukan pilihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Kecamatan Tomohon Tengah terletak pada ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dengan suhu udara 28 derajat celsius. Kondisi lingkungan masyarakat kondusif, tentram dengan penduduk mayoritas homogen. Jarak ke Ibu Kota Tomohon 2,5 km dengan waktu tempuh 5 menit, dari ibukota provinsi sekitar 25 km, dan

dengan sarana transportasi umum yang relatif lancar dan memadai. Kecamatan Tomohon terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Talete Satu, Kelurahan Talete Dua, Kelurahan Matani Satu, Kelurahan Matani Dua, Kelurahan Matani Tiga, Kelurahan Komasi, dan Kelurahan Kolongan. Jumlah penduduk seluruhnya sekitar 18.556 jiwa, sebagian besar (90%) beragama Kristen Protestan, sebagian lainnya Katholik, Islam, dan Budha.

2. Potensi dan Sumber Alam

Hasil yang saat ini diperoleh dari pengolahan tanah berupa hasil pertanian tanaman padi dan palawija, seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Sedangkan produksi padi pada tahun 2004 menghasilkan padi sekitar 6.995 ton. Produksi tanaman sayuran tahun 2004 mencapai 9.839 ton, produktivitas tertinggi didominasi oleh tanaman terong sebesar 162,74 kw/ha. Sedangkan produksi tanaman perkebunan terdiri dari kelapa, cengkeh, vanili, kopi, dan kakao. Produksi tanaman perkebunan terbanyak adalah kelapa mencapai 729,125 ton. Untuk tahun 2004, sektor peternakan populasi terbesar terdiri dari sapi, kuda, kambing dan babi.

Melihat potensi alam, terutama hasil pertanian dan perkebunan, pasang surutnya tampak tergantung dari luas lahan yang semakin menyempit dikarenakan banyak pembangunan permukiman penduduk, mini market dan mall.

3. Agama dan Kepercayaan

Agama yang dianut penduduk Kecamatan Tomohon Tengah mayoritas beragama Kristen Protestan. Dan sebagian lainnya beragama Katholik, Islam, dan Budha. Dengan demikian di lokasi kajian sarana ibadah yang paling menonjol adalah Gereja. Di Kecamatan Tomohon Tengah hanya terdapat sarana ibadah umat Islam, yaitu satu buah Masjid. Semua tempat ibadah tersebut merupakan usaha swadaya masyarakat. Saat ini semuanya masih dalam kondisi bagus dan masih digunakan sebagai tempat untuk ibadah umat penduduk di wilayah Kecamatan Tomohon Tengah.

Kelompok-kelompok yang terkait dengan keagamaan yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah adalah kelompok kebaktian gereja.

Kegiatan yang dilakukan kelompok ini diantaranya adalah mengadakan kebaktian.

4. Sarana Pendidikan

Sebagai daerah perkotaan, Tomohon Tengah mempunyai sarana pendidikan yang relatif cukup lengkap, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Sekolah negeri yang dimiliki wilayah ini adalah SD (3 buah), SLTP (3 buah), dan satu perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan sebagian lainnya yang jumlahnya relatif lebih banyak adalah sekolah atau perguruan tinggi swasta, yakni terutama yang dikelola oleh yayasan atau perkumpulan agama.

Tabel 1. Sarana Pendidikan di Kecamatan Tomohon Tengah

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	TK Swasta	13
2.	SD Negeri	3
3.	SD Swasta	9
4.	SLTP. Negeri	3
6.	SLTA. Swasta	7
7.	PT.Swasta	5
8.	PT.Negeri	1
9.	Akademi Swasta	2
10.	SLB	1
11.	Sekolah Kursus Montir	3
12.	Kursus Menjahit	7
13.	BLK	1

5. Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan/perawatan kesehatan masyarakat di Kecamatan Tomohon Tengah, umumnya penduduk memanfaatkan sarana kesehatan yang telah ada dan letaknya relatif cukup dekat.

Masing-masing Puskesmas maupun Balai Pengobatan Jemaat Gereja maupun rumah sakit swasta (dibawah yayasan gereja) di Kecamatan Tomohon Tengah saat ini memiliki seorang Dokter, Perawat, dan Bidan dan para medis/perawat.

Tabel 2. Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tomohon Tengah

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Kelurahan						
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Apotik	-	1	-	1	1	-	1
2.	Rumah sakit	1		1	1	1	1	-
3.	Posyandu	2	1	1	2	2	1	2
4.	Dokter Praktek Bersama	2	-	-	1	1	1	1
5.	Dokter Umum	1	-	2	1	1	1	-
6.	Dokter Gigi	1	-	1	1	2	1	2
7.	Dokter Mata	1	1	-	-	2	1	-
8.	Dokter THT	1	-	-	1	1	1	-
9.	Dokter Kulit	1	-	1	-	2	1	1
10.	Dokter Jiwa	-	1	1	-	2	1	-
11.	Dokter Hewan	1	-	1	1	3	1	-
12.	Bidan	1	1	2	1	2	2	1
13.	Mantri Kesehatan	1	-	1	1	1	-	1
14.	Dukun Bayi	-	1	1	-	2	1	1
15.	Puskesmas	-	-	-	-	1	2	-
16.	Puskesmas Pmbantu	-	-	1	1	-	-	-
17.	Toko Obat	1	1	2	-	2	1	3
18.	Dukun	-	-	-	-	-	2	-

Keterangan: a = Kel. Talete 1 c = Kel. Komasi e = Kel. Matani 1 g = Kel. Matani 3
 b = Kel. Talete 2 d = Kel. Kolongan f = Kel. Matani 2

6. Ekonomi

Sebagai daerah perkotaan, Tomohon Tengah mempunyai sarana ekonomi yang cukup lengkap, misalnya warung/toko, pasar, mall/swalayan dan sebagainya. Secara lebih rinci sarana ekonomi yang ada dapat dilihat pada tabel 3. Oleh karena itu, kebutuhan sandang dan keseluruhan bahan pangan masyarakat Tomohon Tengah mudah diperoleh dari pasar di lingkungan sekitar. Selain belanja langsung di pasar yang ada di wilayah kecamatan tersebut, masyarakat juga belanja di Mall dan juga di Minimarket/Supermarket yang banyak bertebaran di wilayah ini khususnya di Kota Tomohon.

Tabel 3. Fasilitas Ekonomi Penduduk Kecamatan Tomohon Tengah

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Kelurahan						
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Warung/Kios	14	10	44	-	8	62	7
2.	Koperasi	1	-	-	2	-	1	2
3.	Super Market/Toko	6	6	13	-	6	1	5
4.	Bank	-	-	-	1	1	-	3
5.	Usaha bersama	1	-	-	1	-	-	-
6.	Kel.Simpan Pinjam	2	-	-	1	-	-	-
7.	Badan Kredit Desa	-	-	-	1	-	-	-
8.	Lumbung Pith Nagari	-	-	-	1	-	-	-
9.	Usaha Industri Kecil	-	-	-	5	-	-	-
10.	Usaha Industri RT	1	-	-	-	-	-	-
11.	Diskotik	4	2	-	1	-	-	-
12.	Karaoke	5	2	-	2	-	-	-
13.	Rumah Bilyar	3	2	-	3	-	-	-
14.	Gdg.Bioskop	-	-	-	1	-	-	-
15.	Hotel/Motel	2	2	-	-	9	-	3
16.	Restoran	5	4	-	-	7	-	3
17.	Losmen	2	3	2	-	3	-	3
18.	Pasar	1	1	-	-	2	-	-
19.	Biro Perjalanan	1	-	-	-	1	-	1
20.	Cafe	4	3	2	-	-	-	2
21.	Mess/asrama	-	-	3	-	-	-	-

Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Fakir miskin merupakan masalah yang sangat menonjol di Tomohon Tengah. Warga masyarakat yang digolongkan sebagai keluarga miskin didasarkan pada tingkat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari serba kekurangan, kondisi bangunan rumah yang tidak layak huni, serta tingkat produktivitas kepala keluarga rendah dan kondisi lain yang tidak mendukung. Kriteria atau pengkategorian warga masyarakat miskin menurut kondisi lokal adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan kecil/tidak tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
- b. Tingkat produktivitas Kepala Keluarga yang rendah, karena sebagai pencari nafkah utama sudah memasuki usia lanjut/pensiun.

Diagnosa Permasalahan Sosial di Kec. Tomohon Tengah-Minahasa

- c. Kondisi bangunan rumah sudah rapuh dan sangat buruk dan bahan atap dari seng yang sudah tua atau menggunakan kayu yang sudah rapuh dengan lantai tanah atau papan.
- d. Status kepemilikan bangunan rumah sebagian adalah masih menumpang dan kontrak/sewa baik dengan orang tua/mertua maupun kerabatan lainnya.
- e. Ukuran bangunan rumah relatif kecil yaitu antara 5 x 4 meter atau 5 x 6 meter dan biasanya tidak mempunyai perekat ruangan.

Sebenarnya secara jujur Wilayah Minahasa (termasuk Tomohon) tidaklah pantas menyandang predikat fakir miskin, karena umum sudah mengetahui bahwa wilayah ini merupakan daerah subur, masyarakatnya intelek dan penghasil cengkeh terkenal. Namun munculnya permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. Pertama-tama berawal dari anjloknya harga cengkeh beberapa tahun silam sehingga semangat masyarakat petani cengkeh turun drastis, dengan demikian sumber penghasilan dari cengkeh tidak lagi menjanjikan.
- b. Diikuti oleh kondisi rawan bencana yang juga meliputi daerah perkebunan cengkeh sehingga muncul kekhawatiran para petani sehingga tidak lagi menggarap lahan perkebunannya.
- c. Karena pergeseran gaya hidup dengan perkembangan kota desa sehingga masyarakat lebih cenderung beralih ke pola hidup kota (modern).
- d. Kurangnya dukungan Pemda setempat bagi kaum petani sehingga dengan mudah para petani begitu saja meninggalkan lahan pertaniannya. Seandainya dimotivasi agar beralih tanam hal ini masih memungkinkan adanya alternatif penghasil lain selain cengkeh.

Ketika para petani beralih profesi menjadi pedagang, atau pengusaha rumah tangga, mereka tidak siap untuk itu sehingga alternatif pilihan adalah menjadi pekerja di Mall, Supermarket, Pertokoan dan sebagainya. Namun kendala lain yang dihadapi, yaitu tidak memiliki keterampilan yang memadai, dan lagi pula lapangan kerja yang tersedia di perkotaan tidak memadai dengan jumlah pencari kerja. Akhirnya secara proses jumlah fakir miskin sedikit demi sedikit mulai membengkak.

Tabel 4. Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Setiap Kelurahan

No.	Jenis PMKS	Kelurahan						
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Anak Nakal	33	-	-	75	-	-	-
2.	Anak Jalanan	16	-	-	-	-	-	-
3.	Anak Cacat	4	-	-	-	-	-	-
4.	Wanita Rawan Sosek	4	6	-	54	-	-	-
5.	Penyanggah cacat	21	9	-	28	25	16	15
6.	Eks Napi	10	6	-	6	-	-	-
7.	Kel.Fakir Miskin	106	109	258	215	96	126	166
8.	Kel.Rmh tdk layak	38	20	24	30	-	-	20
9.	Kel.Rentan	24	-	-	-	-	-	-
10.	Pengungsi	3	-	-	-	-	-	-
11.	Anak Terlantar	-	24	50	40	16	60	-
12.	Wanita Krbn Kekerasan	-	16	15	97	16	10	26
13.	LU Terlantar	-	30	55	10	25	115	96
14.	Rawan Banjir	-	-	-	46	-	-	50
15.	Korban benc. Alam	-	-	-	15	-	-	-
16.	Kel.Bermasalah Sos. Psik.	-	-	-	2	-	-	-
17.	Eks.Pnykt Kronis	-	-	-	10	-	-	-

Tabel 5. Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Setiap Kelurahan

No.	Jenis PSKS	Kelurahan						
		a	b	c	d	e	f	g
1.	Arisan	2	1	1	3	2	1	1
2.	PKK	2	2	1	1	2	1	1
3.	PSM	-	-	-	1	1	1	-
4.	Orsos Kemasy.	4	4	5	2	1	4	2
5.	Karang Taruna	1	-	-	-	1	2	-
6.	Orsos	1	2	1	-	2	1	1
7.	LKMD	1	2	1	1	2	1	1
8.	Org. Pemuda	2	1	1	1	1	1	1
9.	Dunia Usaha Peduli Kesos	1	-	-	-	1	1	1
10.	Panti Asuhan	-	2	-	-	-	-	1
11.	Koperasi	2	-	-	-	-	-	-
12.	Org. Profesi	8	2	1	1	-	-	1
13.	Panti Werdha	-	-	-	-	1	-	-
14.	Rmh Jompo	-	-	-	-	1	-	-

Rumah tidak layak huni di beberapa kelurahan hampir sama dengan kondisi di kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Tomohon Tengah yaitu Kelurahan Talete I dan II, Kelurahan Matani I, II, III, Kelurahan Komasi dan Kelurahan Kolongan. Jumlah rumah tak layak huni pada kelurahan yang mempunyai permasalahan ini berkisar antara: 20 hingga 30 keluarga. Rumah-rumah tersebut adalah rumah dalam bentuk rumah asli Minahasa yang sebagian besar terbuat dari kayu. Karena ketiadaan biaya perbaikan, maka rumah-rumah ini semakin lama semakin rusak dan kondisinya tampak tidak layak huni. Para penghuninya tidak punya kemampuan untuk memperbaiki rumah-rumah tersebut sehingga melapor dan meminta bantuan melalui dinas sosial setempat. Kriteria rumah tidak layak huni menurut kondisi lokal, sebagai berikut:

- a. Jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan luas rumah
- b. Kondisi bangunan rumah sudah rapuh
- c. Ukuran bangunan rumah relatif kecil
- d. Status kepemilikan bangunan rumah masih menumpang
- e. Kurangnya perlengkapan fasilitas MCK.

Wanita korban tindak kekerasan terdapat hampir di setiap kelurahan (ada enam kelurahan). Wanita yang digolongkan sebagai wanita korban kekerasan didasarkan pada status perkawinan, tingkat penghasilan dan jumlah beban tanggungan. Kategori wanita korban kekerasan didasarkan pada kriteria lokal, sebagai berikut:

- a. Usia antara 20 hingga 60 tahun
- b. Status perkawinan: janda ditinggal mati suami atau belum menikah.
- c. Banyak anak dan belum ada yang menikah.
- d. Penghasilan kecil
- e. Memiliki sumber penghasilan yang tidak menentu.

Lanjut Usia terlantar terdapat hampir disemua kelurahan. Ada di 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah. Warga masyarakat di golongan lanjut usia terlantar didasarkan pada usia, kondisi ekonomi, serta seberapa besar perhatian dan perawatan yang diberikan oleh anak/cucu atau keluarga lainnya. Sedangkan kriteria yang digunakan di Tomohon Tengah, sebagai berikut:

- a. Umur diatas 60 (enam puluh) tahun keatas.
- b. Hidup sendiri atau bersama anak/cucu atau keluarga lainnya tetapi sangat kurang diperhatikan dalam perawatan, permakanan dan kebutuhan hidup lainnya, baik karena ketidakmampuan ekonomi maupun non ekonomi.

Masalah Anak Nakal merupakan masalah yang bersifat embrio yang muncul melalui tahapan-tahapan proses yang kelihatannya bersumber dari faktor lingkungan. Keterangan-keterangan yang diperoleh di lapangan menggambarkan proses seperti itu. Perkembangan kota desa yang memang berkembang dewasa ini menyebabkan juga adanya perubahan perkembangan perilaku anak, misalnya munculnya tempat belanja berupa supermarket, café, atau diskotik, yang menyebabkan para remaja mulai beradaptasi diri dengan tempat-tempat ini. Contoh kasus lapangan yang dilihat langsung adalah di salah satu supermarket, sejak supermarket buka hingga ditutup pada malam harinya, polisi piket di depan supermarket dengan maksud menghindari masuknya para remaja siswa sekolah terutama pada jam-jam pelajaran sekolah (baik siswa pagi maupun siswa siang). Hal yang sama dilakukan di café-café atau tempat hiburan lainnya.

Pada mulanya masyarakat di wilayah Tomohon terkenal sebagai petani cengkeh yang ulung, sekarang pola hidup sudah mulai bergeser dengan perubahan paradigma sebagai pedagang, pengusaha versi perkotaan. Oleh karena itu, putra-putri mereka juga secara otomatis mewarisi gaya hidup ini dengan tidak disebut sebagai anak petani dan lebih *prestise* kalau disebut sebagai anak pengusaha (ala kota pedesaan). Akibatnya, selepas sekolah mereka tidak mempunyai kegiatan, sehingga untuk mengisi kekosongan terjadilah pertemuan antar remaja dan kalau sudah berkumpul mulai bertindak yang tidak wajar. Dari sinilah timbul kenakalan-kenakalan remaja. Bentuk kenakalan anak menurut definisi wilayah ini adalah mengganggu ketertiban masyarakat setempat dengan tindakan kumpul-kumpul yang disertai mabuk-mabukan, dengan mengkonsumsi minuman keras (miras), tindak kriminal walaupun dalam skala Desa/kelurahan dalam bentuk mengganggu milik masyarakat.

Masalah yang dekat dengan anak nakal dan anak terlantar yaitu **anak jalanan**, yakni para remaja yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di jalanan secara tidak menentu. Faktor penyebabnya adalah faktor putus sekolah, ketiadaan kegiatan yang pasti dan ketidaksadaran akan makna

mencari hidup. Diawali dengan jarang tinggal di rumah kemudian menjadi keseringan maka pada akhirnya hidup di luar menjadi suatu yang merupakan kebiasaan dan pada akhirnya menjadi pilihan. Faktor penyebab munculnya anak jalanan ini, berawal dari kurangnya pengawasan orang tua, namun karena kembali lagi terjadi perkembangan kota pedesaan maka cukup membawa pengaruh pada kebiasaan hidup anak.

Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah suatu permasalahan yang dialami oleh sekelompok wanita, dimana para wanita ini tidak mempunyai sumber penghasilan yang tetap. Minimnya lapangan kerja bagi kaum wanita di Kelurahan ini menjadi sumber permasalahan. Sebagai wilayah kelurahan yang kapasitas pertumbuhan industri tidak memungkinkan, maka sulit bagi para wanita untuk mendapatkan sumber penghidupan yang tetap. Hal ini ditambah pula dengan ketiadaan keterampilan yang dimiliki para wanita ini. Informasi lapangan yang diperoleh menyatakan, bahwa permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan menurunnya secara drastis pertanian cengkeh yang tadinya menjadi idola di wilayah ini. Selepas dari itu para wanita ini sama sekali tidak punya alternatif lain untuk mengatasi permasalahan mereka.

Permasalahan kecacatan secara khusus merupakan masalah yang tidak semata karena kelalaian manusia, seperti misalnya cacat karena faktor bawaan, maka permasalahan yang dihadapi di kelurahan ini merupakan masalah sosial umum yang penanganannya berada dibawah Pemerintah Daerah setempat.

Jumlah kasusnya cukup banyak yakni 114 kasus. Dari sejumlah penyandang terdapat banyak diantaranya yang dapat dibina untuk melakukan kegiatan mandiri dengan dimodali oleh Pemda setempat.

Masalah yang terkesan rawan bagi masyarakat adalah **eks narapidana**, dengan alasan kalau-kalau suatu saat nanti perilakunya akan muncul kembali. Para napi pun ini sadar bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat kurang dapat diterima. Narapidana berawal mula dari kenakalan remaja, lama kelamaan meningkat ke tindakan kriminal dan akhirnya sebagai penghuni rutan. Dimanapun permasalahan narapidana ini hadir menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan yang sangat bijak agar persepsi masyarakat terhadap para penyandanganya tidak ditolak oleh masyarakat setempat.

Keluarga rentan termasuk kategori keluarga manula yang perlu mendapat pertolongan. Sebenarnya keluarga rentan ini bisa ditangani oleh masing-masing keluarga, namun karena kondisi keluarga dalam kondisi yang sama yaitu ketidakmampuan ekonomi sehingga permasalahan keluarga rentan ini menjadi permasalahan tersendiri. Yang terutama memberi perhatian adalah kepedulian pemerintah setempat. Keluarga-keluarga rentan ini dalam keadaan pasrah menunggu pertolongan pemerintah. Sayangnya di Minahasa ini belum begitu terdengar hal penampung keluarga rentan atau semacam panti penampungan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Masalah yang paling menonjol dan merupakan masalah prioritas di kelurahan-kelurahan wilayah Tomohon Tengah adalah masalah fakir miskin. Permasalahan ini merata terdapat di semua kelurahan (7 kelurahan).
2. Di beberapa kelurahan, masalah yang juga masalah prioritas kedua adalah masalah lanjut usia terlantar.
3. Masalah-masalah lain berdasarkan pengamatan dan hasil kajian penelitian merupakan masalah yang terkait dan bersumber dari masalah-masalah prioritas seperti kemiskinan.

Dari kesimpulan yang diambil dari hasil kajian akan diberikan saran-saran/rekomendasi, sebagai berikut :

1. Perlu program yang baku, khususnya bagi permasalahan fakir miskin yang sesuai dengan sumber permasalahan lokal, sehingga diperoleh cara penyelesaian yang tepat. Untuk itu, program yang tepat adalah pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan dan jaminan sosial, dengan memperhatikan kriteria lokal dan sumber-sumber yang tersedia.
2. Masalah lanjut usia yang sudah ada pedoman penanganannya, memerlukan langkah-langkah kegiatan yang lebih praktis dan nyata, mudah diacu atau diikuti masyarakat, sehingga penanganannya dapat lebih tuntas.

3. Masalah-masalah terkait lainnya perlu ditangani dengan upaya pencegahan, misalnya melalui penyuluhan, membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, dan meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar lebih berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Tomohon dengan BPS Kabupaten Minahasa, 2005, *Tomohon Dalam Angka (Tomohon In Figures)*
- Departemen Sosial, 2002, *Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, Pusdatin, Jakarta.
-, 2004, *Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsep dan Strategi*, Jakarta, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.
- Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Tomohon, 2005 *Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Tomohon Tahun 2005-2009*
- Dwi Heru Sukoco, 1991, *Profesi Pekerja Sosial*, Bandung, STKS Press
- Tim Crescent IPB, 2003, *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama